

ABSTRAK

Intan Aulia Pertiwi: Kontestasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008-2024.

Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto menjadi perhatian serius dalam diskursus demokrasi di Indonesia. Usulan untuk mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD memunculkan pro dan kontra, khususnya terkait efektivitas, partisipasi publik, serta kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks ini, Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah yang telah menjalani Pilkada langsung sejak 2008 menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji, mengingat dinamika politik lokalnya yang kompleks dan beragam. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap potensi kemunduran demokrasi jika Pilkada langsung benar-benar dihapuskan.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama yaitu bagaimana sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut tahun 2008–2024? dan bagaimana kontestasi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Garut tahun 2008–2024? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara historis perjalanan Pilkada langsung di Garut serta menganalisis dinamika kontestasi politik antar calon dalam setiap periode pemilihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan demokrasi lokal di tingkat kabupaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahapan utama. Pertama, heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Kedua, kritik sumber, baik secara internal maupun eksternal, untuk menguji keabsahan data. Ketiga, interpretasi terhadap data dan fakta sejarah yang ditemukan agar dapat memahami konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi kontestasi Pilkada. Terakhir, historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan kronologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Pilkada langsung di Garut pada tahun 2008, kontestasi politik berlangsung semakin terbuka, kompetitif, dan mencerminkan keberagaman kepentingan di tengah masyarakat. Dinamika ini sejalan dengan teori kontestasi yang dikemukakan oleh Dryzek, Laclau, dan Mouffe, yang memandang bahwa politik demokratis adalah ruang diskursif di mana berbagai klaim identitas dan kepentingan saling bersaing dan bernegosiasi. Dalam konteks Garut, Pilkada menjadi arena hegemonik tempat aktor politik berupaya membentuk makna, pengaruh, dan legitimasi melalui strategi simbolik dan koalisi kekuasaan. Meskipun kontestasi ini belum sepenuhnya bebas dari praktik negatif seperti politik uang dan polarisasi, keberlangsungannya justru memperkuat proses demokratisasi lokal. Oleh karena itu, wacana penghapusan Pilkada langsung justru berisiko menutup ruang artikulasi politik yang sehat dan menghambat dinamika kontestasi yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri